

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis keberadaan atau eksistensi serta justifikasi yuridis formal terhadap HPL dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerbitan sertifikat HPL milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang berlindung pada eks hak atas tanah Barat, yaitu *Erfpacht Verponding* di atas tanah adat. Begitu pula, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dapat diberikan dalam rangka menyelaraskan keberadaan HPL dengan hukum pertanahan nasional.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang diteliti adalah, terutama bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sejalan dengan metode yang dipergunakan, teori yang dipergunakan adalah teori Keadilan Bermartabat dan teori hak dalam hukum tanah di Indonesia.

Penelitian menemukan, dalam temuan berupa Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat harus dilihat sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) bahwa bukan saja dapat memperkuat anggapan awam bahwa ada kekaburan pengaturan atas eksistensi HPL itu dalam Sistem Hukum Pancasila. Namun, sebagai akibat dari penerbitan sertifikat HPL di atas Tanah Adat, telah timbul ketidakpastian hukum, yang ditinjau dari perspektif Keadilan Bermartabat termasuk pula ketidakadilan dan ketiadaan manfaat dari hak-hak yang ada saat ini maupun hak-hak atas tanah yang lahir dari Hukum Adat dan yang telah dikuatkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya terdapat hambatan yang besar untuk menyelaraskan HPL dengan hak-hak atas tanah lainnya sistem hukum pertanahan di Indonesia. Ada tumpang tindih hak-hak yang lahir dari diterbitkannya sertifikat HPL di atas tanah adat dengan hak-hak atas tanah yang timbul dari hukum adat. Padahal, asas dalam UUPA jelas mengatur bahwa hukum adat merupakan fondasi dari hukum pertanahan Nasional. Solusi yang tersedia saat ini, yaitu membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang HPL. Untuk sementara adanya tumpang tindih hak, dapat diselesaikan dengan membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Pengelolaan, Hak Adat

ABSTRACT

This research was aimed at understanding and analyze the existence of any legal justification on the HPL in the Indonesian land law system. Appart from it, to know and analyze legal consequence following the issuance of the HPL Certificate given to the Local Government, which paid its homage to the ext Westerned Rights of Land, *Erfpacht Verponding* on the land controlled by the Adat Law. It has also made to know and analyze obstacles and solusion to adjust the HPL with National Land Laws.

Research method used was a normative legal research. Materials collected and studied has been categorised into three parts i.e. primary, secondary and tertiary. Concentration has been given to the primary legal materials, particularly jude-made-laws. This method is correspond to the theory of Dignified Justice and the rights theory in the Indonesian land laws.

It has been found, in several judge-made-laws, which in accordance with the Dignified Justice Theory, as manifestations of the spirit of the people (*Volksgeist*) that not only support the assumption from the men in the street that there has been no laws governing the HPL. But, as a result of the issuance of the Certificate HPL on the Adat rights of Land, there occured a legal uncertainties, which if it is observed from the perspective of the Dignified Justice Theory would also be considered as injustice and a waste of all rights of land arisen from Adat Land Laws. Meaning there has been a huge obstacle to adjust the HPL with the rights of lands recognised by the Indonesian land laws. There has been overlapping of rights derived from HPL with rights borned from the Adat Laws. It is goes against the grain that the Indonesian Land Law is based on the Adat Law. It has been suggested as a sulation to solve the problem, to propose a new Acts and a new law, specifically govern the HPL. Appart from it, as a temporary measure, in line with the Dignified Justice Theory it has been suggested that in order to solve the problem of overlapping rights of land created as the by product of the issuance of the Certificate of HPL, the affected parties could bring their case to the relevan aauthorities or the State Administrative Court in order to seek justice in accordance with the existing laws.

Keywords: Legal Consequence, Government's Right of Land Use, Adat Rights of Land